

Kajian Islam tentang Demokrasi Pendidikan

Sri Haningsih

Dosen & Sekretaris Jurusan Tarbiyah FIAI UII

Pendahuluan

Dalam rangka merealisasikan terwujudnya demokrasi pendidikan, rasanya layak untuk mengajukan model pendidikan secara Islam. Artinya dalam pendidikan yang dilaksanakan, harus dijiwai nilai akidah dan moral Qur'ani. Asumsinya adalah bahwa nilai moral (*moral values*) yang termuat dalam Alqur'an dan Sunnah Rasul memiliki sifat yang unggul secara universal dibanding nilai moral yang sekarang ini diterapkan.

Upaya tersebut di atas hendaknya senantiasa diperhatikan dan dilakukan secara serius, intensif dan berkelanjutan oleh para pakar pendidikan. Setelah penulis melakukan proses pengamatan dan perenungan yang mendalam terhadap berbagai krisis dan problematika dalam dunia pendidikan Islam, maka dalam usaha mewujudkan tujuan pendidikan Islam yang ideal dalam kehidupan sosial masyarakat, hendaklah para pakar pendidikan Islam segera kembali (*back to basic*) kepada kemurnian Alqur'an dan Al-Sunnah.

Paradigma inilah yang memotivasi penulis untuk mengkaji kembali (*rethinking*) tentang

demokrasi pendidikan dalam perspektif Islam yang bertujuan menjadikan media pendidikan personal (*individu*) dalam mencapai kedewasaan spiritual dan intelektualnya.

Arti Demokrasi Pendidikan

Untuk memperkuat dunia pendidikan dalam proses perubahan (*baca: reformasi*), diperlukan reformasi internal dunia pendidikan itu sendiri. Namun, untuk itu tidaklah mudah, karena dunia pendidikan memiliki kompleksitas tersendiri. Hal ini karena dunia pendidikan tentu tidak semata pendidikan formal, tetapi juga non-formal yang kedua-duanya sangat penting dalam *character building*. Begitu pula dunia pendidikan, tidak semata pendidikan tinggi, tetapi juga pendidikan dasar dan menengah, dengan berbagai bentuk variannya. Tidaklah cukup untuk mengkaji seluruh kompleksitas pendidikan itu, sehingga gagasan reformasi pendidikan dalam tulisan ini hanya dibatasi pada pemikiran ulang (*rethinking*) Demokrasi Pendidikan dalam Perspektif Islam yang dapat dipakai sebagai dasar pijak pendidikan secara universal.

Di alam demokrasi terdapat orde dan kebebasan yang sama bagi setiap warganya. Ada hak dan kewajiban setiap warga masyarakat, serta ada pula pengakuan terhadap nilai dan martabat individu selaku pribadi. Pengakuan terhadap pribadi itu mengandung pengertian adanya hak setiap individu untuk mencukupi segala kebutuhan yang kodrati - khususnya pemenuhan kebutuhan pokok bagi hidupnya sehari-hari guna menjunjung derajat dirinya (proses transendensi diri) dan mendapatkan pengakuan terhadap milik pribadi.

Kartini Kartono (1997:97), menyatakan bahwa salah satu sarana untuk mencapai kondisi demokratis adalah dengan *pendidikan*. Sebab pengoperan nilai-nilai hukum dan moral, warisan benda-benda budaya, keyakinan agama, pengetahuan dan teknologi semuanya dilakukan lewat pendidikan, dan dengan pendidikan pula anak manusia akan sanggup memecahkan permasalahan hidup sehari-hari, di samping menyesuaikan diri terhadap perubahan dan kejadian baru di masa mendatang.

Oleh karena itu tampaknya *tingginya tingkat pendidikan* dan *tingginya taraf kebudayaan rakyat* akan menjadi barometer bagi pertumbuhan bangsa dan negara yang bersangkutan. Sebab itulah negara, khususnya negara demokrasi, sangat berkepentingan dengan pendidikan warganegaranya dan anak rakyat, demi menanamkan norma-norma demokrasi untuk ikut bertanggung jawab atas diterapkannya asas demokrasi.

Melalui perencanaan yang sistematis, *pendidikan demokratis* dibangun dan dikembangkan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan rakyatnya, agar setiap individu dapat bebas berkembang menurut kodratnya. Pendidikan tidak diberikan dengan tekanan dan paksaan, tetapi dengan *kebebasan* serta

diberikan di tengah masyarakat bebas. Selanjutnya agar manusia dapat ikut berpartisipasi dalam dinamika kebudayaan masa depan ia memerlukan *pendidikan* bebas yang hanya bisa berlangsung dalam dunia demokrasi.

Mengenai kedudukan individu dalam demokrasi ini, disinyalir dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 (2): *setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran*, seperti juga ditegaskan dalam hadis Nabi: "*Tolabul ilmi faridlatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin*". Dari paparan hadist tersebut menunjukkan kebebasan setiap individu untuk dapat menikmati pendidikan tanpa tekanan sedikitpun.

Esensi Demokrasi Pendidikan Islami

Secara esensial, demokrasi pendidikan merupakan suatu gambaran ideal yang akan terus diperjuangkan dan *disempurnakan* (Kartono Kartini : 1997:98). Beberapa kondisi positif untuk mempercepat dan memperkuat proses melalui *penyebaran upaya pendidikan*, yang memungkinkan timbulnya kesadaran kritis mengenai arti demokrasi beserta masalah-masalah sosial-politik zamannya di tengah masyarakat (*kondisi pertama*). *Kondisi kedua* adalah partisipasi aktif rakyat dalam proses pemerintahan, karena jiwa demokrasi adalah aksi-partisipatif.

Kedua kondisi tersebut di atas dalam konsep Islam sangat relevan dengan salah satu esensi pendidikan Islam yaitu *misi humanisasi* (kemanusiaan), dan pembentukan kepribadian yang sempurna. Pendidikan Islam menyadarkan manusia bahwa jati dirinya adalah makhluk yang berbeda dengan hewan. Bahkan manusia lebih tinggi dan sempurna dari makhluk lain. Pendidikan Islam menempatkan posisi manusia

secara proporsional. Inilah hakekat demokrasi pendidikan Islam.

Posisi dan proporsi manusia di dunia pendidikan yang demokratis dapat kita kaji pada surat Al-Baqarah 30-33 Allah berfirman yang artinya:

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama-nama benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar". Mereka menjawab: "Maha Suci Engkau tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". Allah berfirman: "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda tersebut kepada mereka nama-nama benda ini: Maka setelah diberitahukannya nama-nama benda tersebut kepada mereka, Allah berfirman: Bukankah sudah Kukatakan padamu, bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?"

Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa posisi manusia adalah sebagai khalifahNya di bumi, karena posisi yang demikian terhormat ini, maka manusia diwajibkan untuk saling belajar dan mengajar dalam perjalanan hidupnya di dunia ini. Meskipun demikian, kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian manusia justru

senang berbuat kehancuran dan pertumpahan darah (terutama di era reformasi ini). Padahal makna reformasi adalah *Al-Tajdid fil-Maslah wal-Ashlah* (pembaharuan menuju hal yang baik dan yang lebih baik). Kelompok manusia yang demikian sebenarnya sangat membutuhkan pendidikan dan pengetahuan yang baik dan benar.

Manusia akan dapat menjalankan tugas kekhalifahannya secara baik jika dibekali dengan ilmu pendidikan, tata cara belajar yang benar dan bertanggung jawab. Ilmu dan sistem belajar ini akan menjadi suatu pedoman dalam perjalanan hidup dan penghambaan kepada Allah. Tanggung jawab individu kaitannya dengan esensi demokrasi pendidikan (perspektif Islam) tersebut merupakan suatu keharusan bagi setiap individu untuk mengetahui posisinya sebagai khalifah Allah di muka bumi ini agar tumbuh sikap mensyukuri kehormatan yang telah diberikanNya kepada dirinya, karena pendidikan Islam berorientasi menciptakan pribadi yang bertanggung jawab.

Dalam mengantisipasi dampak negatif di era reformasi yang sedang marak, pendidikan Islam berperan menanamkan idealisme dan doktrin-doktrin kepada anak didik agar selalu memuliakan akal serta memelihara jiwa dan raganya, menghindari perbuatan yang merugikan prestise dan kepribadiannya. Pada sisi lain demokrasi pendidikan yang Islami juga memberikan kebebasan berpikir, berlogika dan berteori tentang realitas dan fenomena alam. Kebebasan tersebut hendaklah benar-benar diperhatikan dan diterapkan kepada anak didik agar memperluas cakrawala dan wawasan berpikir mereka dengan menggunakan berbagai media dan alat-alat studi lain, kemampuan menganalisis, penggunaan metode ilmiah dan sebagainya yang akhirnya diharapkan mereka

akan sampai pada tahap kemantapan iman dan ma'rifat kepada Allah sekaligus sebagai individu yang "sempurna" dan komprehensif.

Penegasan Konsep Pendidikan dan Pendidikan Islam

Untuk membangun paradigma pendidikan, perlu ada klarifikasi konsep pendidikan dan pendidikan Islam. Slamet Iman Santoso (1987:97) menyinggung hal tersebut setidaknya-tidaknyanya ada dua hal pokok yang mendasarinya yaitu:

Pertama, semua usaha pakar pendidikan hanya berupa pendapat terpisah-pisah atau pendapat pribadi masing-masing. Pendapat terpisah ini semuanya merupakan perintis jalan, dan selanjutnya pendapat terpisah tersebut disambung dengan pendapat yang terorganisasi (*an organized collective conclusion*) oleh seluruh pakar yang berkompeten dalam hal pendidikan tersebut. Hal ini semuanya sangat perlu kalau kita ingin memperbaiki konsep pendidikan kita agar tidak ketinggalan dalam berbagai aspek.

Kedua, bagaimanapun istilah pendidikan diucapkan berulang kali, tetapi definisi yang diformulasikan secara lengkap dan resmi disampaikan kepada masyarakat sebagai pedoman dalam usaha melaksanakan pendidikan nampak belum jelas. Slamet Iman Santoso: (1987:98) mencoba memaparkan suatu definisi yang lengkap dan resmi dapat dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan sekaligus menstabilkan pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang dimaksudkan adalah usaha "etis" manusia, untuk manusia dan untuk masyarakat manusia sehingga dapat mengembangkan semua bakat seseorang secara optimal dengan tujuan supaya tiap-tiap manusia dan masyarakatnya terus menerus mencapai martabat kehidupan yang lebih tinggi.

(Yusuf Amir Faisal: 1996:94) memaparkan konsep pendidikan Islam dianalogikan dengan istilah taklim dan tarbiyah sebagaimana dikatakan dalam Alqur'an, sekalipun konotasi tarbiyah lebih luas karena mengandung arti memelihara, membesarkan dan mendidik serta sekaligus mengandung makna mengajar (*allama*). Naquib Alatas (1994:35) mendefinisikan pendidikan Islam diartikan sebagai upaya membentuk manusia untuk menempati tempatnya yang tepat dalam susunan masyarakat serta berperilaku secara proporsional sesuai dengan susunan ilmu dan teknologi yang dikuasainya.

Penegasan pemaknaan tersebut perlu, karena di balik konseptualisasi tersebut terkandung niatan antisipatif bagaimana nilai moral Islam dapat menjadi nilai moral universal bagi pengembangan pendidikan dan pengembangan iptek sejak dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Pendidikan Islam yang penulis maksudkan adalah perlunya diadakan reorientasi disiplin ilmu pendidikan agar berlandaskan nilai Islam. Selain itu juga sebagai tawaran alternatif bagi terhadap disiplin ilmu pendidikan yang menggunakan landasan moral lain.

Konsekuensi konseptualisasi tersebut menuntut kemampuan peran ahli-ahli agama Islam untuk menjadi *kontributor* bagi beragam disiplin ilmu. Untuk mengelaborasi konsep tersebut sistem pendidikan Islam dapat pula dibangun dari sejumlah teori-teori tertentu. Misalnya *teori fitrah* atau watak dasar, *a good active* dapat menjadi postulasi pertama ilmu pendidikan yang Islami. *Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak* (Al-hadits) dapat menjadi postulasi kedua, *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai postulasi ketiga. Keteladanan (*uswatun hasanah*) dapat menjadi postulasi keempat.

Beberapa tawaran teori di atas kemudian dikomparasikan dengan sistem pendidikan modern yang karakteristiknya antara lain: *Pertama*, mempunyai kecenderungan mengesampingkan atau menyisihkan eksistensi agama (sekuler). *Kedua*, mendikhotomikan agama dengan persoalan dunia. Kedua karakter ini pada tataran praktisnya justru hanya terpusat pada kepentingan dunia *an sich*, akibatnya posisi agama terdistorsi dalam kehidupan manusia. Hal ini berdampak terjadinya penyempitan fungsi pendidikan. Akurasi pendidikan hanya distandarkan pada kesenangan dan kesejahteraan hidup manusia di dunia (*hedonisme*), sedangkan pendidikan Islam sangat memperhatikan kedua dimensi agama dan dunia secara proporsional. Agama (*al-din*) dalam sistem pendidikan Islam berfungsi sebagai pengendali dan pendorong manusia dalam melakukan kebaikan, baik bagi dirinya, masyarakat dan manusia pada umumnya.

Perbedaan tujuan dan fungsi pendidikan, berdampak lanjut terhadap timbulnya perbedaan prinsip dan media pengajarannya, setidaknya dapat diruak pada paparan berikut:

1. Pendidikan modern menganggap kebahagiaan hidup manusia hanya distandarkan pada adanya fasilitas yang memudahkan dan kenikmatan yang dirasakan manusia. Prinsip ini akan menimbulkan kondisi yang dilematis, terutama jika terjadi pertentangan (kontradiksi) antara kebutuhan terhadap kemaslahatan individu dengan keinginan untuk menciptakan kemaslahatan sosial, yang keduanya saling berbenturan dan bertabrakan. Dilematikanya adalah, jika kemaslahatan individu yang lebih diprioritaskan, maka yang akan merajalela adalah watak egoisme dan sentimentil, karena masing-masing berusaha saling menjatuhkan dan menghancurkan. Sebaliknya, apabila yang diprioritaskan adalah kebutuhan dan

penetrasi terhadap aspek kebebasan, minat, kecenderungan, dan emosional individual.

2. Pendidikan Islam tidak mendasarkan kebahagiaan hidup manusia di dunia sebagai sesuatu yang dikultuskan dan mutlak tanpa batas, sebagaimana dalam sistem pendidikan modern. Kebahagiaan manusia dalam perspektif pendidikan Islam diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan akan kepuasan aspek intelektual, kejiwaan dan spiritual.

Dikhotomi agama dan dunia dalam sistem pendidikan modern berdampak pula pada corak lembaga pendidikannya. Di satu tempat muncul lembaga pendidikan agama, sementara di tempat lain didirikan lembaga pendidikan modern (sekuler). Lembaga pendidikan modern, dalam konteks ini, adalah lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah dan para peminat kemodernan lainnya, sedangkan lembaga pendidikan agama didirikan oleh pemuka-pemuka agama, baik di masjid, gereja, madrasah, pesantren dan institusi keagamaan lainnya.

Sistem pendidikan Islam tidak mengenal adanya dikhotomi agama dan dunia. Pendidikan Islam berusaha mengintegrasikan aspek agama dan dunia dalam kehidupan manusia. Aktualisasi dari integritas kedua aspek ini akan mewarnai kepribadian manusia. Manusia yang terbentuk dari sistem pendidikan Islam adalah manusia yang memiliki kepribadian yang komprehensif. Karena itu pendidikan Islam tidak menganut sistem dikhotomi.

Kurikulum sistem pendidikan modern bersumber dari hasil penelitian ilmiah, eksperimen dan pengalaman hidup (empiris) yang hanya diukur dengan apakah ia dapat digunakan untuk kesejahteraan manusia di dunia, ataukah tidak? Jika tidak, maka ia tidak dijadikan sumber kurikulum. Selanjutnya kurikulum pendidikan Islam bersumber pada semua unsur tersebut, akan

tetapi tidak berhenti hanya sampai pada kebahagiaan kehidupan di dunia saja. Bahkan lebih jauh, pendidikan Islam berorientasi bagi kehidupan yang lebih tinggi dan hakiki, yaitu bagi kehidupan akhirat. Berbeda halnya dengan pendidikan modern yang menganggap kebahagiaan hidup di dunia sebagai tujuan final, maka pendidikan Islam memandang kebahagiaan hidup di dunia sebagai jalan dan media (*washilah*) dalam mencapai tujuan yang hakiki bagi kebahagiaan akhirat.

Penutup

Demokrasi pendidikan dalam perspektif Islam yang penulis maksudkan bukanlah menjadikan semua jenis pendidikan di dunia ini harus Islami tetapi kepada dunia pendidikan kita tawarkan nilai moral Islam sebagai dasar moral universal. Penulis berharap kepada para ilmuwan muslim dapat mengadakan ekstensi ilmunya secara integral untuk dapat mengkaji lebih luas lagi hakekat demokrasi pendidikan.

Daftar Pustaka

- BP-7 Pusat: 1994, UUD 1945, P4 dan GBHN.
Kartini Kartono: 1997, *Tinjauan Politik Sistem Pendidikan Nasional (Beberapa Kritik dan Sugesti)*, Jakarta: PT. Pradnyaparamita.
Naquib Al-Attas: 1994, *Konsep Pendidikan dalam Islam*, Bandung: Mizan.
Noeng Muhajir: 1996, *Lektur Pendidikan Islam*, Yogyakarta, PT. Kurnia Kalam Semesta.
Slamet Iman Santoso: 1987, *Pendidikan di Indonesia dari Masa ke Masa*, Jakarta: PT. Pertja.
Yusuf Amir Faisol: 1996, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.